

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA-SKPD)  
BAPPEDA  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**MUARA TEWEH**

**PEBRUARI 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. A. Yani Nomor 86 ☎ 21130 Muara Teweh 73811

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**

Nomor : 050.13/260.a/Bapp/A2/2013

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/332/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2014;
19. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/332/2013, tanggal 14 Mei 2013, tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 sebagaimana tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara menjadi Pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MUARA TEWEH  
PADA TANGGAL 20 MEI 2013



KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19631014 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
3. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
4. A r s i p.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa, Bappeda Kabupaten Barito Utara berhasil menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014.

RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 disusun melalui berbagai tahapan penyusunan, mulai dari penyusunan rancangan awal RENJA-SKPD Bappeda, yang dilakukan penyempurnaan melalui pembahasan RENJA-SKPD pada Forum SKPD, kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian rancangan RENJA-SKPD Bappeda dengan rancangan RKPD Kabupaten Barito Utara pada Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Utara dan akhirnya dengan Pengesahan RENJA-SKPD oleh Bupati Barito Utara dan Penetapan RENJA-SKPD Bappeda oleh Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara, maka disusunlah RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014.

Maksud disusunnya RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi institusi. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah, sebagai tolok ukur kinerja untuk dasar evaluasi kinerja aparatur serta untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi kepada unit satuan kerja.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) merupakan rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana aspirasi masyarakat pada Musrenbang tingkat Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan

Dengan maksud untuk memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan lebih komprehensif, diperlukan suatu proses perencanaan pembangunan daerah yang integrasi, partisipatif, berdaya saing serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga perencanaan program pembangunan di daerah, menyusun RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 merupakan salah satu aktivitas untuk meningkatkan kapasitas unit kerja perencanaan pembangunan daerah dan merupakan aktualisasi dari fungsi manajemen, sekaligus juga sebagai landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 ini juga dimaksudkan untuk menjalankan tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta pengendalian pembangunan (monitoring dan evaluasi) sebagai umpan balik perencanaan tahun anggaran yang akan datang.

Melalui penyusunan RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi aparat perencanaan pada lintas bidang/fungsi/sektor serta dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan di daerah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu direncanakan diharapkan mampu untuk menjembatani dan memaduserasikan antara sumber daya yang substansi guna kemajuan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

Disadari bahwa teknis penyusunan, substansi materi dan penyajian RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 ini belum sempurna karena berbagai keterbatasan, namun ke depan akan diupayakan untuk disempurnakan lagi. Karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Semoga RENJA-SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Muara Teweh, 20 Mei 2013



KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631014 199003 1 007

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	I-1
I.1. Latar Belakang .....	I-1
I.2. Landasan Hukum .....	I-3
I.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
I.4. Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	II-1
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD ....	II-1
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-5
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	II-9
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-10
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-10
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	III-1
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	III-1
III.3 Program dan Kegiatan .....	III-9
BAB IV    PENUTUP .....	IV-1



## V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL II.1.1.	Matrik Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 – 2018 .....	V-1
TABEL II.1.2.	Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2012 .....	V-3
TABEL II.1.3.	Perkiraan Penetapan Kinerja tahun 2013 .....	V-14
TABEL II.2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Utara .....	V-21
TABEL II.4.1.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 .....	V-22
TABEL II.5.1.	Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2014 .....	V-33
TABEL III.1.1.	Identifikasi kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten .....	V-34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Utara tahun 2014. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2014-2019 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2019 yaitu : "TERSUSUNNYA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERARAH DAN REALISTIS"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan memperhatikan aspek dan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif serta bottom up dan top down.
2. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh rencana pembangunan untuk menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2014, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2014 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

## I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 20 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 – 2013.
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas perda No 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2013.
23. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2013.
24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2014;
25. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/332/2013, tanggal 14 Mei 2013, tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014.

### I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi institusi.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD dibuat dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur
2. Merupakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
3. Merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi kepada unit satuan kerja.

## I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang Lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah pelaksanaan kegiatan Bappeda dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2019.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

### BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Matrik Rencana Strategis Bappeda dalam lima tahun dilihat pada tabel II.1.1,

## Evaluasi Program Tahun 2012

Anggaran Tahun 2012 Bappeda Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 4.727.171.125,- (termasuk perubahan) dengan 13 program dan 53 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.068.196.207,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,23% dan capaian kinerja keuangan sebesar 64,91%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga dan kegiatan Pembangunan Taman dan Halaman Kantor sehingga tidak dapat terealisasi secara optimal atau terealisasi 0 %, yaitu :

### Permasalahan dan Pemecahan Masalah

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Masalah	Pemecahan Masalah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Jasa pengumuman lelang)	3.000.000,-	0	Untuk proses lelang dan pengumuman lelang dipusatkan pada kegiatan LPSE pada Bagian Humas Setda Kab. Barut, sehingga proses pelelangan pada Bappeda dibebankan pada kegiatan LPSE dan anggaran yang tersedia pada kegiatan tersebut tidak digunakan.	Untuk tahun 2013 tidak dianggarkan lagi dan dipindahkan ke kegiatan lain.
2.	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	23.500.000,-	0	Minimnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Perubahan APBD dan DPA Perubahan baru selesai pada bulan Desember	Dalam pengusulan anggaran perubahan akan lebih memperhitungkan waktu yang ada disamping ketersediaan dana.

### Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan pagu sebesar Rp. 5.401.722.711,00 terurai dalam 13 program dan 59 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Utara, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sebagai "Pengarah". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2009 – 2013, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan- kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Barito Utara dan Bappeda Kabupaten Barito Utara.
  - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi melakukan inovasi- inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang NSPM ( Norma-Standar-Prosedur-Manual), sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana & prasarana yang ada.
  - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang

Perkiraan Pencapaian Kinerja tahun 2013 dilihat pada tabel II.1.3

## II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis Kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD, untuk SKPD yang belum memiliki SPM selain menggunakan IKK, juga dirumuskan dengan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri, dapat dilihat pada tabel II.2.1 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Utara)

## Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Barito Utara, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

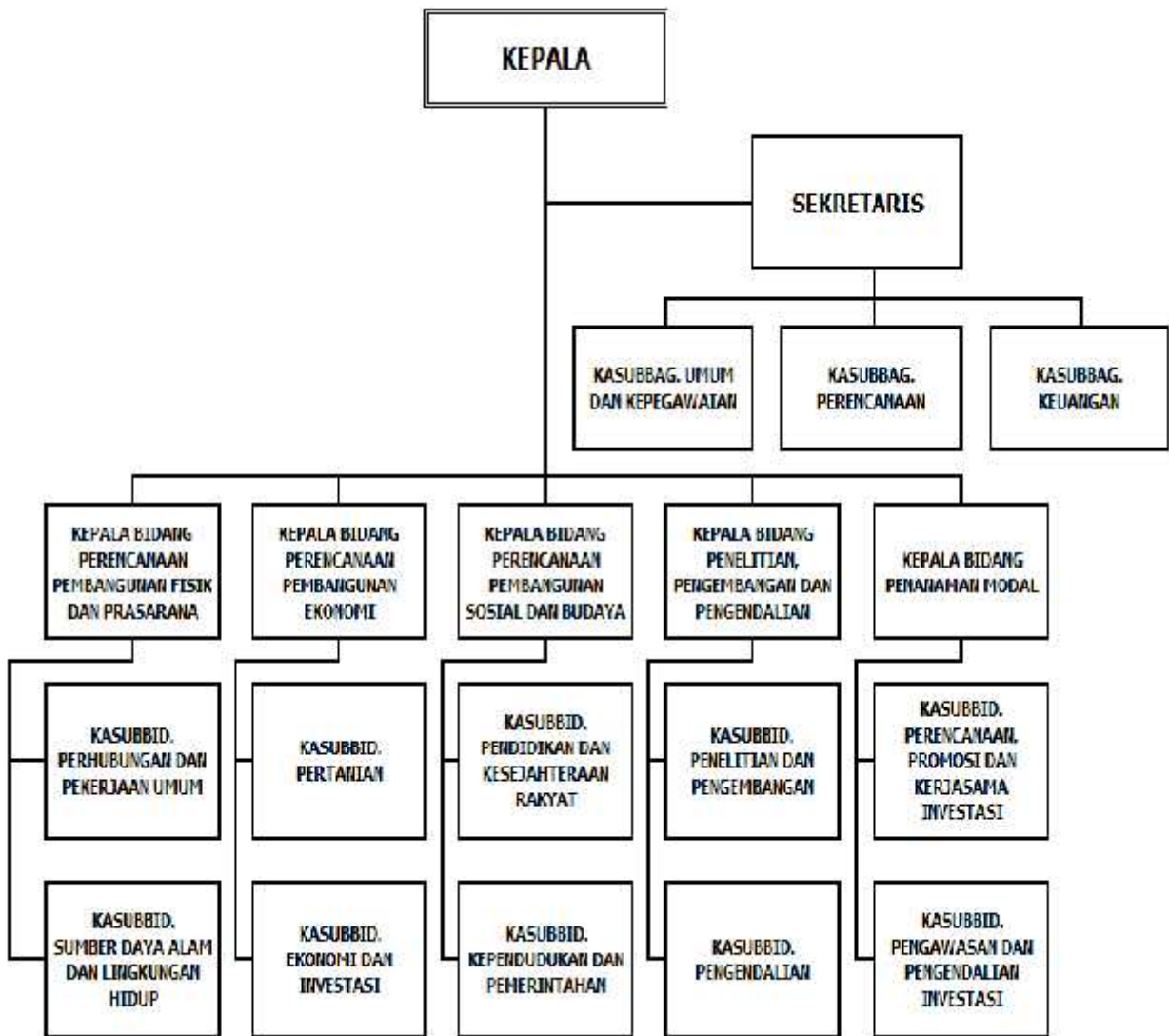
1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang mengelola Sekretariat yang terdiri dari :
  - a. Subbag. Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag. Perencanaan
  - c. Subbag. Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi : yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pertanian dan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Investasi.
  - b. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya : yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Perencanaan Kependudukan dan Pemerintahan.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana : yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dan Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian yang terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Pengendalian.
  - e. Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi dan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara ini adalah sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

Struktur Bappeda Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 01 Tahun 2012 sebagai berikut :



## Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Barito Utara yang membantu Bupati Barito Utara dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Barito Utara.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.



3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

## II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

### Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor : 1 tahun 2012, tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

### Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

#### II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, Indikator kinerja Program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 dituangkan dalam tabel II.4.1, sedangkan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 dituangkan dalam tabel II.4.2.

#### II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel II.5.1

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas Pembangunan nasional antara lain :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi
5. Infrastruktur
6. Penanggulangan kemiskinan
7. Iklim Investasi dan usaha
8. Ketahanan Pangan
9. Lingkungan hidup dan bencana

Dituangkan dalam tabel Identifikasi kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam tabel III.1.1

### III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

#### A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihas ilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel. III.A. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

No.	Misi	Tujuan
1.	Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan memperhatikan aspek dan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif serta bottom up dan top down.	Meningkatnya kualitas Perencanaan
2.	Menyusun Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi
3.	Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh rencana pembangunan untuk menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.	Meningkatnya koordinasi monitoring dan evaluasi

## B. SASARAN

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Tabel III.B. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
1	2	3	4
1.	Misi I : Meningkatnya kualitas Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Pedoman system perencanaan</li> <li>2. Tersedianya Dokumen Perencanaan</li> <li>3. Tersedianya kualitas aparatur Perencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Perda, Perbup tentang system perencanaan pembangunan yang disusun</li> <li>2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan</li> <li>3. Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek, Diklat Perencanaan</li> </ol>
2.	Misi II : Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data base perencanaan</li> <li>2. Tersedianya informasi Pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Ketersediaan data base perencanaan</li> <li>2. Tingkat ketersediaan informasi Pembangunan</li> </ol>
3.	Misi III : Meningkatnya koordinasi monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata pelaksanaan rakordal Pelaksanaan Pembangunan per tahun.</li> <li>2. Rata-rata pelaksanaan Monitoring kegiatan Pembangunan per tahun</li> </ol>

## C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 1. Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintahan) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

#### a. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Barito Utara yang berhasil diidentifikasi antara lain :

Tabel III.C.1. Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN-S	NO	KELEMAHAN-W
S1	Struktur Organisasi yang jelas.	W1	Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM Perencana
S2	Sarana dan Prasarana yang memadai.	W2	Suasana kerja yang belum kondusif
S3	Sumber Pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	W3	Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang
S4	Kuantitas SDM yang memadai	W4	Belum optimalnya system pengelolaan data base perencanaan
S5	Motivasi bekerja yang kuat	W5	Lemahnya pelaksanaan evaluasi

FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG – O	NO	TANTANGAN - T
O1	Kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan	T1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang system dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif
O2	Dukungan dari database SKPD lain		
O3	Perkembangan teknologi		
O4	Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang Perencanaan pembangunan	T2	
O5	Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan system perencanaan		
		T3	Sering berubahnya peraturan perundangan
		T4	Kurangnya koordinasi antar SKPD
		T5	Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislative dan eksekutif

## 2. Faktor Kunci Keberhasilan

### a. Penilaian Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan Strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Faktor Kunci Keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci. Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor maka digunakan metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode untuk menentukan urgen atau tingkat kepentingan satu faktor dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Adapun hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor disajikan dalam matriks berikut.



Tabel III.C.2 Matrik Urgensi Faktor Internal

STRENGTH	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
S1	4	$4/41 \times 100 \% = 10 \%$
S2	2	$2/41 \times 100 \% = 5 \%$
S3	5	$5/41 \times 100 \% = 12 \%$
S4	2	$2/41 \times 100 \% = 5 \%$
S5	3	$3/41 \times 100 \% = 7 \%$
WEAKNESS		
W1	5	$5/41 \times 100 \% = 12 \%$
W2	5	$5/41 \times 100 \% = 12 \%$
W3	5	$5/41 \times 100 \% = 12 \%$
W4	5	$5/41 \times 100 \% = 12 \%$
W5	5	$5/41 \times 100 \% = 12 \%$
JUMLAH	41	

Tabel III.C.3. Matrik Urgensi Faktor eksternal

OPPORTUNITY	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
O1	4	$4/38 \times 100 \% = 11 \%$
O2	2	$2/38 \times 100 \% = 5 \%$
O3	3	$3/38 \times 100 \% = 8 \%$
O4	3	$3/38 \times 100 \% = 8 \%$
O5	3	$3/38 \times 100 \% = 8 \%$
THREATS		
T1	5	$5/38 \times 100 \% = 13 \%$
T2	5	$5/38 \times 100 \% = 13 \%$
T3	5	$5/38 \times 100 \% = 13 \%$
T4	4	$4/38 \times 100 \% = 11 \%$
T5	4	$4/38 \times 100 \% = 11 \%$
JUMLAH	38	

## b. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

Tabel evaluasi faktor internal dan eksternal mengandung kolom dengan pengertian sebagai berikut :

- Nilai Urgensi (NU) ditentukan dari Tabel 4.4. dan 4.5
- Bobot Faktor (BF). Tiap faktor dibobot tingkat urgensinya. Tingkat urgensinya dinyatakan dalam Bobot Faktor (BF) dan satuan ukurannya adalah %. Rumus  $BF = \frac{NU}{\sum NU} \times 100\%$ . ditentukan dari tabel 4.4. dan 4.5.
- Nilai Dukungan Faktor (ND). Tiap faktor sebenarnya merupakan input yang harus dikelola dengan baik agar memberikan dukungan yang istimewa atau selalu maksimal sehingga menjadi unggul dalam meraih sukses yang lebih besar. ND tiap faktor diukur dengan skala nilai 1-5.
- NBD (Nilai Bobot Dukungan) ditentukan dengan rumus:  $NBD = ND \times BF$ .
- Nilai Keterkaitan (NK) adalah nilai Keterkaitan suatu faktor dibandingkan dengan faktor lainnya dan dengan skala 1-5.
- Nilai Rerata Keterkaitan (NRK) adalah jumlah nilai NK dibagi 19 sebagai rata-rata keterkaitan. Rumus  $NRK = \frac{\sum NK}{19}$ .
- Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) tiap faktor dihitung dengan rumus :  $NBK = NRK \times BF$
- Total Nilai Bobot (TNB). TNB tiap faktor dapat dihitung dengan memakai rumus :  $NBD + NBK = TNB$ .

Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) merupakan peringkat prioritas dari TNB terbesar dari masing-masing faktor. Disini hanya ada dua FKK sebagai bahan untuk analisis berikutnya. Program/kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional dan merupakan tahapan yang penting dalam menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi dari suatu instansi pemerintah, cara pencapaian tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan operasional instansi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan nasional strategik.

Mengingat pentingnya kebijaksanaan operasional dalam menentukan tingkat keberhasilan program maupun kegiatan suatu instansi pemerintah, maka setiap kebijakan operasional yang akan ditetapkan harus terlebih dahulu diuji kualitasnya.

Adapun program-program dari Bappeda Kabupaten Barito Utara yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Pengembangan Data/Informasi, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Adapun beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

### III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

#### URUSAN WAJIB : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
  - 1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - 1.7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 1.8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - 1.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 1.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.16. Penyediaan bahan logistik kantor
  - 1.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 1.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
  - 1.19. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran/teknis Perkantoran
  - 1.20. Penyediaan Jasa Pihak Ketiga
  - 1.21. Penyediaan Jasa Non PNS dan Non PNS
  - 1.24. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
  - 1.27. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 2.3. Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Aula)
  - 2.9. Pengadaan peralatan gedung kantor.
  - 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 2.23. Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan.
  - 2.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
  - 2.28. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor.
  - 2.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 5.3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
  - 6.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 6.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
  - 6.3. Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
  - 6.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
  - 6.5. Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD.
15. Program Pengembangan Data dan Informasi
  - 15.11. Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia(IPM) Barito Utara
  - 15.12. Penyusunan PDRB (Penyusunan PDRB Barito Utara dan Rapat Koordinasi Regional PDRB se Kalteng di Muara Teweh).
  - 15.13. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah.
  - 15.25. Penyusunan Barito Utara dalam Angka.
16. Program Kerjasama Pembangunan
  - 16.2. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 21.05. Penyusunan Rancangan RPJM.
  - 21.08. Penyusunan Rancangan RKPD.
  - 21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  - 21.13. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
  - 21.14. Penyusunan KUA, PPAS.
  - 21.18. Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra SKPD.
  - 21.22. Evaluasi RPJMD
22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - 22.04. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

23. Program Perencanaan Sosial Budaya.

23.03. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

23.05. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

24.05. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.

URUSAN WAJIB : PENANAMAN MODAL

15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

15.12. Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPMO).

15.13. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan.

15.14. Promosi potensi daerah dan peluang investasi.

15.15. Pembuatan leaflet potensi dan peluang investasi.

15.16. Data profil investasi sektor unggulan.

16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

16.10. Pengawasan dan pengendalian investasi.

16.11. Pembinaan PMA / PMDN.

16.12. Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

#### I. KELOMPOK SASARAN

Tersedianya Pedoman system perencanaan pembangunan daerah

Antara lain :

- A. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur  
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan
- B. Program Kerjasama Pembangunan daerah  
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah

#### II. KELOMPOK SASARAN

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah

Antara lain :

- A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan antara lain :
  - 1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara
  - 2. Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara
  - 3. Penyusunan KUA dan PPAS.
  - 4. Penyusunan RKA/DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara
  - 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten
  - 6. Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
  - 7. Evaluasi RPJMD
- B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian kegiatan antara lain :
  - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi.

- C. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan rincian kegiatan antara lain :
  - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
  - 2. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan masyarakat
- D. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam dengan rincian kegiatan antara lain :
  - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.

### III. KELOMPOK SASARAN

Tersedianya kualitas aparatur perencana antara lain :  
Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur  
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan

### IV. KELOMPOK SASARAN

Tersedianya data base perencanaan, antara lain :

- A. Program Pengembangan data dan informasi  
Kegiatan :
  - 1. Penyusunan PDRB (Penyusunan PDRB Barito Utara dan Rapat Koordinasi Regional PDRB se Kalteng di Muara Teweh).
  - 2. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah.
  - 3. Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia(IPM) Barito Utara
  - 4. Penyusunan Barito Utara dalam Angka.

### V. KELOMPOK SASARAN :

Tersedianya informasi Pembangunan, antara lain :

- A. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi  
Kegiatan :
  - 1. Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPMMD).
  - 2. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan.
  - 3. Promosi potensi daerah dan peluang investasi.
  - 4. Pembuatan leaflet potensi dan peluang investasi.
  - 5. Data profil investasi sektor unggulan.



B. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Kegiatan :

1. Pengawasan dan pengendalian investasi.
2. Pembinaan PMA / PMDN.
3. Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN.

VI. KELOMPOK SASARAN

Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi, antara lain :

- A. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pembangunan

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakkan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Barito Utara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Barito Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Muara Teweh, 20 Mei 2013

Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Barito Utara,

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310141990031007

Tabel II.1.1.

**MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 - 2018**

No.	Program / Kegiatan		Satuan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif kegiatan (Rp)				
	Uraian	Indikator Kinerja			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Belanja Program dan kegiatan pada setiap SKPD</b>				6.000.000.000	6.200.000.000	6.400.000.000	6.600.000.000	7.000.000.000
2.	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>								
	1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Pelaksanaan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Kali	1	400.000.000	440.000.000	488.000.000	545.600.000	614.720.000
3.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								
	1. Penyusunan Rancangan RKPD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen RKPD	Dokumen	100	200.000.000	220.000.000	244.000.000	272.800.000	307.360.000
	2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2010	Pelaksanaan Musrenbang Kec. Kab. Prov. dan Pusat	Kali	4	350.000.000	402.000.000	464.400.000	539.280.000	629.136.000
	3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Koordinasi Monitoring rencana pembangunan daerah	Kali	4	300.000.000	320.000.000	344.000.000	372.800.000	407.360.000
	4. Penyusunan KUA, PPAS	Dokumen KUA,PPAS	Dokumen	100	250.000.000	290.000.000	338.000.000	395.600.000	464.720.000
	5. Penyusunan RPJM Kabupaten (5 tahun) 2019 - 2023	RPJM Kabupaten Barito Utara tahun 2019 - 2023	Dokumen	100					500.000.000
4.	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>								
	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi	Kali	1	100.000.000	108.000.000	116.000.000	127.200.000	140.640.000
5.	<b>Program perencanaan sosial budaya</b>								
	1. Koordinasi penyusunan master plan pendidikan	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan masterplan pendidikan	Kali	1	100.000.000	108.000.000	117.600.000	129.120.000	142.944.000
	2. Koordinasi penyusunan master plan kesehatan	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan masterplan kesehatan	Kali	1	100.000.000	108.000.000	117.600.000	129.120.000	142.944.000
	3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan sosial budaya	Kali	1	100.000.000	108.000.000	117.600.000	129.120.000	142.944.000
	4. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Koordinasi PNPM	Kali	1	200.000.000	240.000.000	288.000.000	345.600.000	414.720.000

No.	Program / Kegiatan		Satuan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif kegiatan (Rp)				
	Uraian	Indikator Kinerja			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6</b>	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>								
	1. Koordinasi dan inventarisasi perencanaan prasarana perhubungan darat	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Prasarana perhubungan darat	Kali	1	100.000.000	110.000.000	120.000.000	134.000.000	150.800.000
	2. Koordinasi dan inventarisasi perencanaan sumber daya alam dan sektor pariwisata	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan SDA dan Pariwisata	Kali	1	100.000.000	110.000.000	120.000.000	134.000.000	150.800.000
	3. Koordinasi dan inventarisasi perencanaan infrastruktur utilitas lingkungan	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur dan utilitas lingkungan	Kali	1	100.000.000	110.000.000	120.000.000	134.000.000	150.800.000
<b>7</b>	<b>Program pengembangan data/informasi</b>								
	1. Penyusunan Profil Daerah ( 2 bahasa)	Buku Profil dalam 2 bahasa	Buku	50	200.000.000	230.000.000	260.000.000	302.000.000	352.400.000
	2. Penyusunan PDRB Barito Utara	Buku PDRB	Buku	50	100.000.000	110.000.000	122.000.000	136.400.000	153.680.000
	3. Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	Buku inventarisasi program pembangunan daerah	Buku	50	100.000.000	115.000.000	133.000.000	154.600.000	180.520.000
	4. Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Daerah Barito Utara	Buku Profil Potensi Ekonomi	Buku	50	100.000.000	110.000.000	122.000.000	136.400.000	153.680.000
	6. Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia (IPM) Barito Utara	Buku IPM	Buku	30	100.000.000	112.000.000	124.400.000	139.280.000	157.136.000
	7. Penyusunan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Barito Utara	Buku IKK	Buku	30	100.000.000	110.000.000	122.000.000	136.400.000	153.680.000
	8. Penyusunan Buku Penduduk Barito Utara	Buku Penduduk Barito Utara	Buku	30	100.000.000	110.000.000	122.000.000	136.400.000	153.680.000
	9. Penyusunan Buku Barito Utara Dalam Angka	Buku Barito Utara dalam angka	Buku	30	200.000.000	210.000.000	222.000.000	236.400.000	253.680.000
	10 Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Barito Utara	Buku IKKR	Buku	30	100.000.000	110.000.000	122.000.000	136.400.000	153.680.000
	11 Penyusunan Analisis Profil Potensi Desa di Kab. Barut	Buku Analisis Profil Potensi Desa	Buku	30	50.000.000	60.000.000	72.000.000	86.400.000	103.680.000
	12 Penyusunan Peta Tematik Kemiskinan Barut	Peta tematik kemiskinan	Peta	1	50.000.000	60.000.000	72.000.000	86.400.000	103.680.000
	13 Penyusunan Peta Tematik Ketersediaan/ Kerawanan Pangan Barito Utara	Peta tematik ketersediaan kerawanan Pangan	Peta	1	50.000.000	60.000.000	72.000.000	86.400.000	103.680.000
	14 Penyusunan Peta Tematik Potensi Ekonomi Daerah Barito Utara	Peta tematik Potensi ekonomi	Peta	1	50.000.000	60.000.000	72.000.000	86.400.000	103.680.000
	15 Kajian Strategi Pengembangan Sapi Potong melalui Pendekatan keunggulan Komparatif dan Pemetaan Daya Dukung Wilayah di Kabupaten Barito Utara	Pelaksanaan Penelitian Sapi potong	Dokumen	1	150.000.000	180.000.000	216.000.000	259.200.000	311.040.000
	16 Kajian Strategi Pengembangan Budi Daya Rotan di Kecamatan Teweh Timur dan Gunung Purei untuk Mempertahankan Eksistensi Produksi	Pelaksanaan Penelitian Budidaya rotan	Dokumen	1	250.000.000	300.000.000	360.000.000	432.000.000	518.400.000

No.	Program / Kegiatan		Satuan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif kegiatan (Rp)				
	Uraian	Indikator Kinerja			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17 Studi Kompetensi Olah dan Pemasaran Karet melalui Pemetaan Potensi Produksi di Kabupaten Barito Utara	Pelaksanaan penelitian Olah karet	Dokumen	1	150.000.000	180.000.000	216.000.000	259.200.000	311.040.000
	18 Uji Coba Pengembangan Listrik Mikro Hidro Terbuka pada Aliran Sungai	Pelaksanaan Penelitian listrik mikro hidro terbuka pada aliran sungai	Dokumen	1	200.000.000	240.000.000	288.000.000	345.600.000	414.720.000
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>								
	1. Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPPMD)	Pelaksanaan RKPPMD	Kali	1	150.000.000	158.400.000	168.480.000	180.576.000	195.091.200
	2. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan	Pelaksanaan Konsolidasi Perencanaan Penanaman modal regional	kali	1	150.000.000	153.600.000	157.920.000	163.104.000	169.324.800
	3. Promosi potensi daerah dan peluang investasi	Pelaksanaan Promosi daerah	kali	1	150.000.000	166.000.000	185.200.000	208.240.000	235.888.000
	4. Pembuatan booklet potensi dan peluang investasi	Booklet potensi	Booklet	50	150.000.000	152.800.000	156.160.000	160.192.000	165.030.400
	5. Data profil investasi sektor unggulan	Buku Profil Investasi Sektor Unggulan	Buku	50	150.000.000	153.500.000	157.700.000	162.740.000	168.788.000
	6. Seminar, Lokarya, Simposium Bidang Penanaman Modal	Pelaksanaan Seminar, simposium, lokakarya	Kali	1	150.000.000	155.600.000	162.320.000	170.384.000	180.060.800
	7. Koordinasi perencanaan penanaman modal	Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Penanaman modal	Kali	1	150.000.000	154.400.000	159.680.000	166.016.000	173.619.200
	8. Sosialisasi Penanaman Modal se Kal-Teng	Pelaksanaan Sosialisasi	Kali	1	150.000.000	155.600.000	162.320.000	170.384.000	180.060.800
	9. Rakor, TOT, Sosialisasi, Temu Usaha, Pelatihan Aparatur	Pelaksanaan Rakor, TOT, Sosialisasi Temu Usaha, pelatihan aparatur	Kali	1	150.000.000	155.600.000	162.320.000	170.384.000	180.060.800
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>								
	1. Pengawasan dan pengendalian investasi	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengan dalian investasi	Kali	1	100.000.000	105.400.000	111.880.000	119.656.000	128.987.200
	2. Pembinaan PMA / PMDN	Pelaksanaan Pembinaan PMA/PMDN	Kali	1	100.000.000	103.600.000	107.920.000	113.104.000	119.324.800
	3. Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN	Pelaksanaan Monitoring	Kali	1	100.000.000	103.600.000	107.920.000	113.104.000	119.324.800
	4. Pengembangan dan menyiapkan data melalui Sistem Informasi Penanaman Modal ( Simpedal )	Data dan informasi melalui Simpedal	Dokumen	1	100.000.000	106.000.000	113.200.000	121.840.000	132.208.000
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>12.200.000.000</b>	<b>13.055.100.000</b>	<b>14.025.620.000</b>	<b>15.163.844.000</b>	<b>17.189.712.800</b>

Tabel II.1.2

## EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN 2012

INSTANSI : BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA

KEGIATAN				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : Dana	11.109.000	6.867.500	61,82	
	Keluaran : Jumlah surat yang dikirim	2.000	2.000	100	
	Hasil : Terkirimnya surat dinas	2.000	2.000	100	
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan : Dana	93.840.000	51.264.863	54,63	
	Keluaran : 1. Pembayaran listrik kantor	1	1	100	
	2. Pembayaran telpon kantor	1	1	100	
	3. pembayaran air kantor	1	1	100	
	Hasil : 1. Tersedianya sarana listrik kantor	1	1	100	
	2. Tersedianya sarana Telpon kantor	1	1	100	
3. Tersedianya sarana air kantor	1	1	100		
3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Masukan : Dana	20.500.000	20.430.000	99,66	
	Keluaran : 1. Terpenuhinya Jasa perbaikan AC	1	1	100	
	2. Terpenuhinya Jasa perbaikan komputer	1	1	100	
	Hasil : 1. Tersedianya sarana AC kantor	1	1	100	
	2. Tersedianya sarana komputer kantor	1	1	100	

1	2	3	4	5	6
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Masukan : Dana	3.100.000	2.350.000	75,81	
	Keluaran : 1. Pemeliharaan kendaraan dinas	14	14	100	
	2. Pengurusan ijin kendaraan dinas	14	14	100	
	Hasil : 1. Terpeliharanya kendaraan dinas	14	14	100	
	2. Tersedianya pengurusan ijin kendaraan dinas	14	14	100	
5. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Masukan : Dana	90.300.000	64.800.000	71,76	
	Keluaran : Pembayaran honor aparat pengurusan keuangan	16	16	100	
	Hasil : Tersedianya aparat pengurusan keuangan	16	16	100	
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Masukan : Dana	40.339.000	32.959.000	81,71	
	Keluaran : Pembayaran honor tenaga kebersihan kantor	72 OB	72 OB	100	
	Hasil : Tersedianya tenaga kebersihan kantor	72 OB	72 OB	100	
7. Penyediaan Alat Tulis kantor	Masukan : Dana	73.437.000	52.734.386	71,81	
	Keluaran : Penyediaan ATK kantor dalam 1 tahun	1	1	100	
	Hasil : Tersedianya sarana penunjang kegiatan kantor	1	1	100	
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Masukan : Dana	84.700.000	69.420.000	81,96	
	Keluaran : 1. Penyediaan barang cetakan kantor	1	1	100	
	2. Penyediaan Penggandaan/fotocopi	1	1	100	
	Hasil : 1. Tersedianya barang cetakan kantor	1	1	100	
	2. Tersedianya penggandaan/fotocopi	1	1	100	
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Masukan : Dana	24.075.000	3.887.500	16,15	
	Keluaran : 1. Penyediaan komponen instalasi	1	1	100	
	2. penyediaan penerangan kantor	1	1	100	

1	2	3	4	5	6
10. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Masukan : Dana	47.800.000	27.900.200	58,37	
	Keluaran : 1. Penyediaan Filling Cabinet	6	6	100	
	2. Pengadaan televisi	6	6	100	
	3. Penyediaan Sound sistem	1	1	100	
	Hasil : 1. Penyediaan Filling Cabinet	6	6	100	
	2. Pengadaan televisi	6	6	100	
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masukan : Dana	33.177.500	23.061.500	69,51	
	Keluaran : 1. Penyediaan bahan bacaan	1	1	100	
	2. Penyediaan peraturan perundang-undangan	1	1	100	
	Hasil : 1. Tersedianya bahan bacaan	1	1	100	
	2. Tersedianya peraturan perundang-undangan	1	1	100	
	12. Penyediaan makanan dan minuman	Masukan : Dana	50.000.000	25.928.500	51,86
Keluaran : 1. Penyediaan makan minum rapat		1	1	100	
2. Penyediaan makan minum rapat tamu		1	1	100	
Hasil : 1. Tersedianya makan minum rapat		1	1	100	
2. Tersedianya makan minum rapat tamu		1	1	100	
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Masukan : Dana	260.169.000	175.468.100	67,44
	Keluaran : Perjalanan dinas ke luar daerah aparat	100 %	100 %	100	
	Hasil : Terlaksananya Perjalanan dinas ke luar daerah	100 %	100 %	100	
14. Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Masukan : Dana	46.250.000	43.800.000	94,70	
	Keluaran : Pembayaran honor tenaga honor	84 OB	84 OB	100	
	Hasil : Tersedianya jasa tenaga administrasi/	84 OB	84 OB	100	
15. Penyediaan Jasa pihak ke tiga	Masukan : Dana	12.000.000	2.100.000	17,50	
	Keluaran : Penyediaan jasa pengumuman lelang	4	1	25	
	Hasil : Tersedianya pengumuman lelang	4	1	25	



1	2	3	4	5	6
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Masukan : Dana	77.625.000	47.757.000	61,52	
	Keluaran : Perjalanan dinas ke dalam daerah aparat	1 tahun	1 tahun	100	
	Hasil : Terlaksananya Perjalanan dinas kedalam daerah	1 tahun	1 tahun	100	
17. Pengadaan Peralatan gedung kantor	Masukan : Dana	306.017.300	252.493.500	82,51	
	Keluaran : Penyediaan peralatan gedung kantor :				
	a. Pengadaan AC	17	17	100	
	b. Pengadaan CCTV	1	1	100	
	c. Pengadaan lonceng	1	1	100	
	d. Pengadaan wireless internet	2	2	100	
	e. Pengadaan bel listrik	1	1	100	
	f. Pengadaan tangga lipat	1	1	100	
	g. Pengadaan komputer PC	1	1	100	
	h. Pengadaan Notebook	5	5	100	
	i. Pengadaan Printer	7	7	100	
	j. Pengadaan UPS	1	1	100	
	k. Pengadaan mouse optik	5	5	100	
	l. Pengadaan dispenser	1	1	100	
	m. Pengadaan kulkas mini	1	1	100	
	n. Pengadaan jam dinding	10	10	100	
	o. Pengadaan gordien	1	1	100	
	Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor :				
	a. Pengadaan AC	17	17	100	
	b. Pengadaan CCTV	1	1	100	
	c. Pengadaan lonceng	1	1	100	
d. Pengadaan wireless internet	2	2	100		
e. Pengadaan bel listrik	1	1	100		
f. Pengadaan tangga lipat	1	1	100		
g. Pengadaan komputer PC	1	1	100		
h. Pengadaan Notebook	5	5	100		
i. Pengadaan Printer	7	7	100		
j. Pengadaan UPS	1	1	100		
k. Pengadaan mouse optik	5	5	100		
l. Pengadaan dispenser	1	1	100		
m. Pengadaan kulkas mini	1	1	100		
n. Pengadaan jam dinding	10	10	100		

	o. Pengadaan gorden	1	1	100	
--	---------------------	---	---	-----	--

1	2	3	4	5	6
18. Pengadaan Mebeluer	Masukan : Dana	105.650.000	87.725.000	83,03	
	Keluaran : Pengadaan meubeluer	5	5	100	
	Hasil : Tersedianya Meubeluer	5	5	100	
19. Pembangunan Taman dan halaman kantor	Masukan : Dana	64.500.000	49.337.500	76,49	
	Keluaran : Taman kantor	1	1	100	
	Hasil : Tersedianya taman kantor	1	1	100	
20. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Masukan : Dana	91.367.250	62.067.600	67,93	
	Keluaran : Pemeliharaan mobil jabatan	1	1	100	
	Hasil : Terpeliharanya mobil jabatan	1	1	100	
21. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Masukan : Dana	21.984.000	0	0	
	Keluaran : Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	13	0	0	
	Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas	13	0	0	
22. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Masukan : Dana	13.700.000	2.698.000	19,69	
	Keluaran : Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	1	1	100	
	Hasil : Terpeliharanya rutin peralatan gedung kantor	1	1	100	
23. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Masukan : Dana	112.500.000	102.628.840	91,23	
	Keluaran : Rehab rumah dinas	1	1	100	
	Hasil :	1	1	100	
24. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Masukan : Dana	860.814.125	792.252.850	92,04	
	Keluaran : Rehab berat gedung kantor	1	1	100	
	Hasil : Terlaksananya rehab berat kantor	1	1	100	

1	2	3	4	5	6
25. Pengadaan mesin/kartu absensi	Masukan : Dana	5.000.000	3.800.000	76,00	
	Keluaran : Mesin kartu absensi	1	1	100	
	Hasil : Tersedianya mesin kartu absensi	1	1	100	
26. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan : Dana	29.250.000	20.665.000	70,65	
	Keluaran : Pakaian dinas beserta kelengkapan	50 stel	50 stel	100	
	Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	50 stel	50 stel	100	
27. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Masukan : Dana	200.000.000	103.925.000	51,96	
	Keluaran : 1. Pembayaran kontribusi	1	1	100	
	2. Pembayaran biaya perjalanan dinas	1	1	100	
	Hasil : 1. Tersedianya Pembayaran kontribusi	1	25	100	
2. Tersedianya Pembayaran biaya perjalanan dinas aparat	1	25	100		
28. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Masukan : Dana	5.000.000	1.797.000	35,94	
	Keluaran : LAKIP Bappeda	20 Ekspl	20 Ekspl	100	
	Hasil : Tersusunnya LAKIP Bappeda	20 Ekspl	20 Ekspl	100	
29. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Masukan : Dana	2.500.000	2.500.000	100	
	Keluaran : Laporan keuangan semesteran	10 Ekspl	10 Ekspl	100	
	Hasil : Tersedianya Laporan keuangan semesteran	10 Ekspl	10 Ekspl	100	
30. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Masukan : Dana	2.500.000	2.500.000	100	
	Keluaran : Laporan prosnosis realisasi anggaran	10 Ekspl	10 Ekspl	100	
	Hasil : Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	10 Ekspl	10 Ekspl	100	
31. Penyusunan plaporan keuangan akhir tahun	Masukan : Dana	2.500.000	2.500.000	100	
	Keluaran : Laporan keuangan akhir tahun	10 Ekspl	10 Ekspl	100	
	Hasil : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	10 Ekspl	10 Ekspl	100	

1	2	3	4	5	6
32. Penyusunan RKA-SKPD/ DPA-SKPD	Masukan : Dana	5.000.000	5.000.000	100	
	Keluaran : 1. RKA Perubahan Tahun 2011	10 Eksp	10 Eksp	100	
	2. RKA Murni Tahun 2012	10 Eksp	10 Eksp	100	
	3. DPA Perubahan Tahun 2011	10 Eksp	10 Eksp	100	
	4. DPA Murni Tahun 2012	10 Eksp	10 Eksp	100	
	Hasil : 1. Tersedianya RKA Perubahan Tahun 2011	10 Eksp	10 Eksp	100	
	2. Tersedianya RKA Murni Tahun 2012	10 Eksp	10 Eksp	100	
	3. Tersedianya DPA Perubahan Tahun 2011	10 Eksp	10 Eksp	100	
4. Tersedianya DPA Murni Tahun 2012	10 Eksp	10 Eksp	100		
33. Penyusunan PDRB Kabupaten Barito Utara	Masukan : Dana	126.333.000	47.759.000	37,80	
	Keluaran : Buku PDRB Kabupaten Barito Utara	60 Buku	60 Buku	100	
	Hasil : Tersedia Buku PDRB Kabupaten Barito Utara	60 Buku	60 Buku	100	
34. Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	Masukan : Dana	87.292.000	76.334.000	87,45	
	Keluaran : 1. Buku Inventarisasi Pembangunan	30 Buku	30 Buku	100	
	2. Buku Laporan Triwulan	20 Buku	20 Buku	100	
	Hasil : 1. Tersedia Buku Inventarisasi pembangunan	30 Buku	30 Buku	100	
2. Tersedianya buku laporan triwulan	20 Buku	20 Buku	100		
35. Penyusunan Barito Utara dalam Angka	Masukan : Dana	126.842.600	55.470.500	43,73	
	Keluaran : Buku Barito Utara dalam Angka	60 Buku	60 Buku	100	
	Hasil : Tersedia Buku Barito Utara dalam Angka	60 Buku	60 Buku	100	
36. Penyusunan Buku Pemutakhiran data profil Potensi Desa	Masukan : Dana	3.875.000	3.875.000	100	
	Keluaran : Buku Pemutakhiran data profil potensi desa	30 Buku	0	0	
	Hasil : Tersedianya Buku Pemutakhiran data profil potensi desa	30 Buku	0	0	

1	2	3	4	5	6
37. Koordinasi kerjasama Pembangunan antar daerah	Masukan : Dana	41.888.400	5.720.000	13,66	
	Keluaran : Mengikuti pertemuan kerjasama pembangunan 12 Kabupaten	10	10	100	
	Hasil : Terlaksana pertemuan kerjasama pembangunan 12 Kabupaten	10	10	100	
38. Penyusunan Rancangan RPJPD	Masukan : Dana	205.830.000	7.590.000	3,69	
	Keluaran : 1. Dokumen RPJP Kabupaten Barito Utara	100	0	0	
	2. Kegiatan Penyusunan RPJP	2	0	0	
	3. Konsultasi Ke jakarta	5	5	100	
	Hasil : 1. Tersedia RPJP Kabupaten Barito Utara	100	0	0	
	2. Terlaksana Penyusunan RPJP	2	0	0	
39. Penyusunan Rancangan RKPDP	Masukan : Dana	76.916.800	48.904.000	63,58	
	Keluaran : Buku RKPDP Kabupaten Barito Utara Tahun 2012	100	100	100	
	Hasil : Tersedia buku RKPDP Kabupaten Barito Utara Tahun 2012	100	100	100	
40. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Masukan : Dana	237.509.650	182.575.400	76,87	
	Keluaran : 1. Kegiatan Musrenbang Kecamatan	6	6	100	
	2. Kegiatan Forum SKPD	1	1	100	
	3. Kegiatan Musrenbang Kabupaten	1	1	100	
	4. Mengikuti Musrenbang kecamatan	32	32	100	
	5. Mengikuti Forum SKPD Propinsi	4	4	100	
	6. Mengikuti Musrenbang Propinsi	8	8	100	
	7 Mengikuti Musrenbang regional	3	3	100	
	8. Mengikuti Musrenbang Nasional	4	4	100	
	Hasil : 1. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	6	6	100	
	2. Terlaksananya Forum SKPD	1	1	100	
	3. Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	1	1	100	
	4. Keikutsertaan Musrenbang kecamatan	32	32	100	
	5. Keikutsertaan Forum SKPD Propinsi	4	4	100	
	6. keikutsertaan Musrenbang Propinsi	8	8	100	
7 Keikutsertaan Musrenbang regional	3	3	100		

1	2	3	4	5	6
	8. Keikutsertaan Musrenbang Nasional	4	4	100	
41. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Masukan : Dana Keluaran : 1. Kegiatan Monitoring ke kecamatan 2. Kegiatan Rakordal Triwulan I,II,III,IV 3. Mengikuti kegiatan Pra rakordal Propinsi di di Palangkaraya Triwulan I,II,III,IV 4. Mengikuti Kegiatan Rakordal Propinsi di Palangkaraya Trwulan I,II,III,IV Hasil : 1. Terlaksananya Montoring ke kecamatan 2. Terlaksananya kegiatan Rakordal triwulan I,II,III,IV 3. Keikutsertaan Prarakordal Propinsi di Palangkaraya triwulan I,II,III,IV 4. Keikutsertaan Rakordal Propinsi di Palangkaraya triwulan I,II,III,IV	259.100.000 4 4 4 4 4 4	196.060.500 4 4 4 4 4 4	75,67 100 100 100 100 100 100	
42. Penyusunan KUA,PPAS	Masukan : Dana Keluaran : 1. KUA, PPAS Tahun Anggaran 2012 2. KUA, PPAS Perubahan TA. 2011 3. Kegiatan Penyusunan KUA, PPAS TA.2012 4. Kegiatan Penyusunan KUA,PPAS Perubahan TA.2011 5. Konsultasi Ke jakarta 6. Konsultasi ke Propinsi Hasil : 1. Tersedianya KUA, PPAS TA. 2012 2. Tersedianya KUA,PPAS Perubahan TA. 2011 3. Terlaksananya Penyusunan KUA,PPAS T.A. 2012 4. Terlaksananya Penyusunan KUA,PPAS Perubahan TA.2011 5. Terlaksananya Konsultasi ke Jakarta 6. Terlaksananya Konsultasi ke Propinsi T.A. 2011	146.544.200 100 100 25 25 3 3 100 100 25 25 3 3	80.965.000 100 100 25 25 3 3 100 100 25 25 3 3	55,25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	

1	2	3	4	5	6
43. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Masukan : Dana	54.913.800	18.440.000	33,58	
	Keluaran : Kegiatan Koordinasi sektor terkait	1	1	100	
	Hasil : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi sektor terkait	1	1	100	
44. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Masukan : Dana	96.269.000	84.067.500	87,33	
	Keluaran : Kegiatan Koordinasi sektor terkait	1	1	100	
	Hasil : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi sektor terkait	1	1	100	
45. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Masukan : Dana	59.394.300	17.473.000	29,42	
	Keluaran : 1. Laporan kegiatan PNPM	20	20	100	
	2. Kegiatan koordinasi PNPM	2	2	100	
	3. Konsultasi ke palangkaraya	3	3	100	
	4. Kegiatan PNPM di Jakarta	3	3	100	
	Hasil : 1. Tersedia laporan kegiatan PNPM	20	20	100	
	2. Terlaksananya koordinasi PNPM	2	2	100	
	3. Terlaksana konsultasi ke Palangkaraya	3	3	100	
4. Terlaksana kegiatan PNPM di Jakarta	3	3	100		
46. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Masukan : Dana	74.439.600	51.718.300	69,48	
	Keluaran : Kegiatan Koordinasi sektor terkait	1	1	100	
	Hasil : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi sektor terkait	1	1	100	
47. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal daerah	Masukan : Dana	50.507.000	47.392.000	93,83	
	Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Penanaman Modal	1	1	100	
	2. Konsultasi ke Propinsi	4	4	100	
	Hasil : 1. Terlaksananya RKPPMD	1	1	100	
	2. Konsultasi ke Propinsi	4	4	100	

1	2	3	4	5	6
48. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se-Kalimantan	Masukan : Dana	21.153.600	13.429.000	63,48	
	Keluaran : Mengikuti Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal regional Kalimantan	8	8	100	
	Hasil : Terlaksananya konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal Regional Kalimantan	8	8	100	
49. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi	Masukan : Dana	75.000.000	62.793.000	83,72	
	Keluaran : Mengikuti Pameran expo ke Jakarta	3	3	100	
	Hasil : Keikutsertaan Pameran expo ke Jakarta				
50. Pembuatan booklet, potensi dan peluang investasi	Masukan : Dana	60.826.000	52.141.750	85,72	
	Keluaran : Cetak Leaflet	2.000	2.000	100	
	Hasil : Tersedia leaflet	2.000	2.000	100	
51. Data Profil Investasi Sektor Unggulan	Masukan : Dana	78.576.000	25.621.000	32,61	
	Keluaran : Cetak data profil	200	200	100	
	Hasil : Tersedia data profil	200	200	100	
52. Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Masukan : Dana	48.453.000	37.990.000	78,41	
	Keluaran : 1. Perjalanan monitoring ke kecamatan	24	24	100	
	2. Perjalanan konsultasi ke propinsi	12	12	100	
	Hasil : 1. Terlaksananya monitoring ke kecamatan	24	24	100	
	2. Terlaksananya konsultasi ke propinsi	12	12	100	
53. Pembinaan PMA/PMDN	Masukan : Dana	69.433.000	29.457.000	42,43	
	Keluaran : 1. Perjalanan monitoring ke kecamatan	40	40	100	
	2. Perjalanan konsultasi ke propinsi	24	24	100	
	Hasil : 1. Terlaksananya monitoring ke kecamatan	40	40	100	
	2. Terlaksananya konsultasi ke propinsi	24	24	100	
54. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN	Masukan : Dana	28.960.275	19.080.275	65,88	
	Keluaran : Perjalanan monitoring ke kecamatan	12	12	100	
	Hasil : Terlaksananya monitoring ke kecamatan	12	12	100	



Tabel II.1.3.

**PERKIRAAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan Pembangunan	Terkirimnya surat-surat keluar dan pembukuan surat-surat masuk	1 Tahun	Memperlancar pengiriman dan penerimaan surat-surat serta tertibnya proses pembukuan surat masuk dan surat keluar	100%	11.109.000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terpenuhinya Sarana Telepon, Listrik dan Air Bersih lingkup Bappeda	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	75%	108.840.000
		3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	20.500.000
		4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya dana pengurusan ijin kendaraan	14 unit	Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan dinas	100%	3.100.000
		5. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan		Tersedianya jasa administrasi keuangan	16 org	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan Bappeda Kab. Barito Utara	80%	90.300.000
		6. Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya petugas kebersihan kantor	5 orang	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor	100%	96.985.000
		7. Penyediaan Alat Tulis kantor		Tersedianya ATK untuk Sekretariat Bappeda Kab. Barito Utara	1 tahun	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100%	73.437.000

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8. Penyediaan barang cetakan		Tersedianya barang cetakan & penggandaan/ fotocopy	1 tahun	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	90.000.000
		9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Terpenuhinya sarana penerangan kantor	1 tahun	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	24.075.000
		10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya surat kabar dan buku Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	Terpenuhinya data dan informasi melalui media massa dan buku peraturan perundang-undangan	100%	36.462.500
		11. Penyediaan bahan logistik kantor		Tersedianya bahan-bahan properti pameran	1 Kegiatan	Meningkatnya kualitas dan keindahan stand Bappeda dalam mendukung pelaksanaan pameran pembangunan	100%	25.000.000
		12. Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum rapat dan tamu	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dan terlaksananya rapat-rapat	100%	75.000.000
		13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Meningkatnya koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan	100%	270.621.000
		14. Penyediaan Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran		Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	5 Tim/Panitia dan 1 org Instruktur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	34.090.000
		15. Jasa pihak ke tiga		Tersedianya jasa pengumuman lelang	2 kegiatan	Memperlancar proses pelelangan	100%	3.000.000

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16. Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya upah dekorasi dan pembuatan stand	1 paket	Meningkatnya kualitas dan keindahan stand bappeda dalam mendukung pelaksanaan pameran pembangunan	100%	7.500.000
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 tahun	Meningkatnya koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan	100%	80.000.000
		18. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor		Tersedianya petugas keamanan gedung kantor	3 orang	Terjaga dan terpeliharanya keamanan lingkungan gedung kantor	1 tahun	43.680.000
		1. Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor	7 macam	Terpenuhinya sarana dan peralatan gedung kantor untuk menunjang kinerja aparatur	100%	164.000.000
		2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terlaksananya kegiatan pengecatan halaman kantor Bappeda	1 paket	Terciptanya halaman kantor yang baik dan indah	100%	35.625.000
		3. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya Mobil jabatan	2 unit	Meningkatnya kelancaran operasional Kepala Bappeda	100%	91.367.250
		4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 unit	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	100%	21.984.000
		5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	100%	13.700.000

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Terlaksananya rehab tempat parkir, pembuatan pintu pagar dan lanjutan pembuatan gapura (pintu gerbang kantor Bappeda	1 paket	Terciptanya kondisi gedung kantor yang aman dan representatif	100%	347.059.300
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas harian pegawai Bappeda	50 stell	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	17.500.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur perencana pembangunan	Tersedianya Aparatur dan SDM yang berkualitas	85%	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	100%	200.000.000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 ekspl	Terukurnya keberhasilan (capaian kinerja) program dan kegiatan lingkup Bappeda	100%	5.000.000
		2. Penyusunan laporan keuangan semesteran		Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	10 ekspl	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	2.500.000
		3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	10 ekspl	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	2.500.000
		4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 ekspl	Tersusunnya data realisasi keuangan untuk 1 tahun anggaran	100%	2.500.000
		5. Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD		Tersusunnya RKA/DPA Bappeda Murni Tahun 2013 dan RKA/DPA Bappeda Perubahan Tahun 2012	40 buku	Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Kinerja Keuangan	100%	5.000.000

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	1. Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan statistik pembangunan	Tersusunnya Buku Profil Daerah dan Data Desa Tertinggal	200 buku	Tersedianya Buku Profil Daerah dan Data Desa Tertinggal	100%	175.000.000
		2. Penyusunan PDRB Barito Utara		Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara	60 buku	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara	100%	126.333.000
		3. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah		Tersusunnya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2012	75 buku	Tersedianya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	100%	100.292.000
				Tersusunnya Buku Laporan Triwulan Tahun 2012	100 buku	Tersedianya Buku Laporan Triwulan Tahun 2012	100%	
4. Penyusunan Barito Utara dalam Angka	Tersusunnya Buku Barito Utara dalam Angka	60 buku	Tersedianya Buku Barito Utara dalam Angka	100%	176.842.600			
VII	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	1. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman	Meningkatnya arus investasi di Kabupaten Barito Utara	Terlaksananya RKPPMD	1 kali	Terbentuknya kesepakatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal perencanaan penanaman modal daerah	100%	75.507.000
		2. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan		Terwujudnya keikutsertaan pada konsolidasi perencanaan penanaman modal	100%	Meningkatnya kesepahaman antar daerah dalam peningkatan investasi	80%	21.153.600
		3. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi		Mengikuti Promosi Investasi Daerah	6 orang	Dikenalnya Kab. Barito Utara sebagai alternatif tujuan investasi	60%	175.000.000
		4. Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi		Tersedianya leaflet mengenai potensi dan peluang investasi	2000 expl	Meningkatnya jumlah referensi media promosi	80%	75.000.000
		5. Data Profil Investasi Sektor Unggulan		Tersusunnya Buku Profil Investor Sektor Unggulan	200 Buku	Meningkatnya jumlah referensi media promosi	80%	53.551.000

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>	1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah		Terlaksananya koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	5 Kabupaten	Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah yang selaras	5 Kabupaten	43.758.400
IX	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	1. Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Meningkatnya arus investasi di Kabupaten Barito Utara	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian investasi	80 %	Perusahaan penanaman modal dapat menyampaikan LKPM	80 %	75.000.000
		2. Pembinaan PMA / PMDN		Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian investasi	80 %	Perusahaan penanaman modal dapat menyampaikan LKPM	80 %	45.453.000
		3. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN		Tersedianya laporan capaian	75%	Perbaiki sistem dan prosedur investasi	75%	28.960.275
X	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1. Penyusunan Rancangan RPJPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Tersusunnya buku RPJPD Kabupaten Barito Utara	200 Buku	Meningkatnya keterpaduan dan keselarasan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang	100%	300.000.000
		2. Penyusunan Rancangan RKPD		Dokumen RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013	100 Buku	Terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	100%	118.265.000
		3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD		Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD	100%	Terakomodirnya dan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang akuntabilitas dan transparan	100%	314.570.400

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring	100 Buku	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan pembangunan daerah	100%	260.000.000
		5. Penyusunan KUA dan PPAS		2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan	100 Buku			
				1. Tersusunnya KUA Perubahan Tahun 2012	100 Buku	Sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan dengan pagu anggaran	100%	162.209.200
				2. Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun 2012	100 Buku			
				3. Tersusunnya KUA Murni Tahun 2013	100 Buku			
				4. Tersusunnya PPAS Murni Tahun 2013	100 Buku			
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terciptanya sinkronisasi program Pembangunan ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	Terciptanya sinkronisasi program bidang ekonomi	100%	91.933.800
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terciptanya sinkronisasi program Pembangunan Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%	Terciptanya sinkronisasi program bidang sosial budaya	100%	145.673.000
		2. Penunangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)		Menunjang Terlaksananya Program PNPM	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	100%	50.000.000

No	PROGRAM UTAMA	SUB PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIII	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Terciptanya sinkronisasi program Pembangunan prasarana wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	100%	Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	100%	110.233.800
<b>J U M L A H</b>								<b>4.727.171.125</b>



Tabel II.2.1

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2011 (Tahun n-2)	Tahun 2012 (Tahun n-1)	Tahun 2013 (Tahun n)	Tahun 2014 (Tahun n+1)	Tahun 2011 (Tahun n-2)	Tahun 2012 (Tahun n-1)	Tahun 2013 (Tahun n)	Tahun 2014 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang sistematis, terarah dan realistis	-	-	100	100	100	100	95,11	-	-	-	Menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) sesuai Keppup No.188.45/5/2011
2.	Pengendalian dan monitoring Pembangunan daerah	-	-	100	100	100	100	95,11	-	-	-	
3.	Peningkatan Perencanaan bidang penanaman modal	-	-	100	100	100	100	95,11	-	-	-	
4.	Peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan	-	-	100	100	100	100	95,11	-	-	-	

TABEL II.4.1

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014  
KABUPATEN BARITO UTARA**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT PTG
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Belanja Program dan kegiatan pada setiap SKPD	Muara Teweh Kab. Barut			7.796.844.864	I. Belanja Program dan kegiatan pada setiap SKPD	Muara Teweh Kab. Barut			2.077.625.750	
II	Program Kerjasama Pembangunan					II Program Kerjasama Pembangunan					
1.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah		Pelaksanaan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	1 Kali	414.720.000	1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah		Terlaksananya koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	5 Kab.	43.758.400	
III	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					III Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
1	Penyusunan Rancangan RKPD	Muara Teweh Kab. Barut	Dokumen RKPD	100 Dok.	207.360.000	1. Penyusunan Rancangan RKPD	Muara Teweh Kab. Barut	Dokumen RKPD Kab. Barito Utara Tahun 2014	100 Buku	118.265.000	
2	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Musrenbang Kec. Kab. Prov. dan Pusat	4 kali	539.136.000	2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Muara Teweh Kab. Barut	Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD	100%	284.570.400	
3	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Muara Teweh Kab. Barut	Koordinasi Monitoring rencana pembangunan daerah	4 kali	207.360.000	3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Muara Teweh Kab. Barut	1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring 2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan	100 Buku 100 Buku	290.600.000	
4	Penyusunan KUA, PPAS	Muara Teweh Kab. Barut	Dokumen KUA,PPAS	100 Dok.	414.720.000	4. Penyusunan KUA, PPAS	Muara Teweh Kab. Barut	1. Tersusunnya KUA Perubahan Tahun 2013 2. Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun 2013 3. Tersusunnya KUA Murni Tahun 2014 4. Tersusunnya PPAS Murni Tahun 2014	100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku	162.209.200	
						5. Penyusunan RPJM Kabupaten (5 Tahun)	Muara Teweh Kab. Barut	Dokumen RPJM Kab. Barito Utara Tahun 2014-2019	100 Buku	300.000.000	
						6. Fasiliasi Penyusunan Renja, Renstra SKPD	Muara Teweh Kab. Barut			114.151.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT PTG
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>					IV	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>				
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi	1 kali	80.640.000	1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Muara Teweh Kab. Barut	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	91.933.800
V	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>					V	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>				
1	Koordinasi penyusunan master plan pendidikan	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan masterplan pendidikan	1 kali	82.944.000	1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Muara Teweh Kab. Barut	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%	145.673.000
2	Koordinasi penyusunan master plan kesehatan	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan masterplan kesehatan	1 kali	82.944.000	2.	Penunngan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Muara Teweh Kab. Barut	Menunngan Terlaksananya Program PNPM	100%	50.000.000
3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan sosial budaya	1 kali	82.944.000						
4	Penunngan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Muara Teweh Kab. Barut	Koordinasi PNPM	1 kali	414.720.000						
VI	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam</b>					VI	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam</b>				
1	Koordinasi dan inventarisasi perenc. prasarana perhubungan darat	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Prasarana perhubungan darat	1 kali	100.800.000	1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Muara Teweh Kab. Barut	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	100%	126.285.386
2	Koordinasi dan inventarisasi perenc. sumber daya alam dan sektor pariwisata	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan SDA dan Pariwisata	1 kali	100.800.000						
3	Koordinasi dan inventarisasi perenc. infrastruktur utilitas lingkungan	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur & utilitas lingkungan	1 kali	100.800.000						
VII	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>					VII	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>				
1	Penyusunan Profil Daerah ( 2 bahasa)	Muara Teweh Kab. Barut	Buku Profil dalam 2 bahasa	50 buku	302.400.000	1.	Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia (IPM) Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Tersusunnya Buku IPM Barito Utara	200 buku	75.000.000
2	Penyusunan PDRB Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Buku PDRB	50 buku	103.680.000	2.	Penyusunan PDRB Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara Terlaksananya jkegiatan Konreg PDRB se Kalteng	2 keg 250.000.000	126.233.000
3	Inventarisasi Program Pembangunan	Muara Teweh	Buku inventarisasi	50 buku	155.520.000	3.	Koordinasi dan Inventarisasi	Muara Teweh	1. Tersusunnya Buku Inventarisasi	75 buku	69.692.000

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT PTG
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Daerah	Kab. Barut	program pembangunan daerah			Program Pembangunan Daerah	Kab. Barut	Program Pembangunan Daerah Tahun 2013			
4	Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Daerah Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Buku Profil Potensi Ekonomi	50 buku	103.680.000			2. Tersusunnya Buku Laporan Triwulan Tahun 2013	100%		
5	Penelitian Ternak Sapi Potong	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Penelitian	1 kali	428.544.000	4. Penyusunan Barito Utara dalam Angka	Muara Teweh Kab. Barut	Tersusunnya Buku Barito Utara dalam Angka	100%	125.000.000	
6	Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia (IPM) Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Buku IPM	30 buku	107.136.000						
7	Penyusunan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Buku IKK	30 buku	103.680.000	5. Penyusunan Tabel Data Input Output	Muara Teweh Kab. Barut	Tersedianya data input dan output	100%	50.000.000	
8	Penyusunan Buku Penduduk Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Buku Penduduk Barito Utara	30 buku	103.680.000						
9	Penyusunan Buku Barito Utara Dalam Angka	Muara Teweh Kab. Barut	Buku Barito Utara dalam angka	30 buku	103.680.000						
10	Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Buku IKKR	30 buku	103.680.000						
11	Penyusunan Analisis Profil Potensi Desa di Kab. Barut	Muara Teweh Kab. Barut	Buku Analisis Profil Potensi Desa	30 buku	103.680.000						
12	Penyusunan Peta Tematik Kemiskinan Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Peta tematik kemiskinan	1 kali	103.680.000						
13	Penyusunan Peta Tematik Ketersediaan/ Kerawanan Pangan Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Peta tematik ketersediaan kerawanan Pangan	1 kali	103.680.000						
14	Penyusunan Peta Tematik Potensi Ekonomi Daerah Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Peta tematik Potensi ekonomi	1 kali	103.680.000						
15	Kajian Strategi Pengembangan Sapi Potong melalui Pendekatan keunggulan Komparatif dan Pemetaan Daya Dukung Wilayah di Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Penelitian Sapi potong	1 kali	311.040.000						
16	Kajian Strategi Pengembangan Budi Daya Rotan di Kec. Tewel Timur dan Gunung Purei untuk Mempertahankan Eksistensi Produksi	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Penelitian Budidaya rotan	1 kali	518.400.000						
17	Studi Kompetensi Olahan & Pemasaran Karet melalui Pemetaan Potensi Produksi di Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan penelitian Olahan karet	1 kali	311.040.000						
18	Uji Coba Pengembangan Listrik Mikro Hidro Terbuka pada Aliran Sungai	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Penelitian listrik mikro hidro terbuka pada aliran sungai	1 kali	414.720.000						
VIII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					VIII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT PTG
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPPMD)	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan RKPPMD	1 kali	87.091.200	1. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Muara Teweh Kab. Barut	Terlaksananya RKPPMD	1 kali	75.507.000	
2	Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Konsolidasi Perencanaan Penanaman modal regional	1 kali	37.324.800	2. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan	Muara Teweh Kab. Barut	Terwujudnya keikutsertaan pada konsolidasi perencanaan penanaman modal	100%	21.253.600	
3	Promosi potensi daerah dan peluang investasi	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Promosi daerah	1 kali	165.888.000	3. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi	Muara Teweh Kab. Barut	Mengikuti Promosi Investasi Daerah	6 orang	100.000.000	
4	Pembuatan booklet potensi dan peluang investasi	Muara Teweh Kab. Barut	Booklet potensi	50 ekspl	29.030.400	4. Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi	Muara Teweh Kab. Barut	Tersedianya leaflet mengenai potensi dan peluang investasi	2000 expl	75.000.000	
5	Data profil investasi sektor unggulan	Muara Teweh Kab. Barut	Buku Profil Investasi Sektor Unggulan	50 ekspl	36.288.000	5. Data Profil Investasi Sektor Unggulan	Muara Teweh Kab. Barut	Tersusunnya Buku Profil Investor Sektor Unggulan	200 Buku	53.551.000	
6	Seminar, Lokarya, Simposium Bidang Penanaman Modal	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Seminar, simposium, lokakarya	1 kali	58.060.800						
7	Koordinasi perencanaan penanaman modal	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Penanaman modal	1 kali	45.619.200						
8	Sosialisasi Penanaman Modal se Kal-Teng	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	58.060.800						
9	Rakor, TOT, Sosialisasi, Temu Usaha, Pelatihan Aparatur	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Rakor, TOT, Sosialisasi	1 kali	58.060.800						
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>					<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>				
1	Pengawasan dan pengendalian investasi	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian investasi		55.987.200	1. Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Muara Teweh Kab. Barut	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian investasi	80 %	75.000.000	
2	Pembinaan PMA / PMDN	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Pembinaan PMA/PMDN	1 kali	37.324.800	2. Pembinaan PMA / PMDN	Muara Teweh Kab. Barut	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian investasi	80 %	45.453.000	
3	Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN	Muara Teweh Kab. Barut	Pelaksanaan Monitoring	1 kali	37.324.800	3. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN	Muara Teweh Kab. Barut	Tersedianya laporan capaian	75%	28.960.275	
4	Pengembangan dan menyiapkan data melalui Sistem Informasi Penanaman Modal ( Simpedal )	Muara Teweh Kab. Barut	Data dan informasi melalui Simpedal	1 kali	62.208.000						
			<b>JUMLAH</b>		<b>14.980.601.664</b>					<b>4.975.722.711</b>	

0

TABEL II.4.2

**RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2014**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>URUSAN WAJIB</b>													
	<b>Bidang Perencanaan Pembangunan</b>													
	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>													
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			M.Teweh, Kab. Barut			Terkirimnya surat-surat keluar dan pembukuan surat-surat masuk	1 Tahun	Memperlancar pengiriman dan penerimaan surat-surat serta tertibnya proses pembukuan surat masuk dan surat keluar	100%	11.109.000			
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik			M.Teweh, Kab. Barut			Terpenuhinya Sarana Telepon, Listrik dan Air Bersih lingkup Bappeda	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	75%	108.840.000			
3.	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	20.500.000			
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya dana pengurusan ijin kendaraan	14 unit	Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan dinas	100%	3.100.000			
5.	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya jasa administrasi keuangan	16 org	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan Bappeda Kab. Barito Utara	80%	90.300.000			
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya petugas kebersihan kantor	5 orang	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor	100%	96.985.000			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.	Penyediaan Alat Tulis kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya ATK untuk Sekretariat Bappeda Kab. Barito Utara	1 tahun	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100%	73.437.000			
8.	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya barang cetakan & penggandaan/ fotocopy	1 tahun	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	90.000.000			
9.	Penyediaan komponen instalasi istrik/penerangan bangunan kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Terpenuhinya sarana penerangan kantor	1 tahun	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	24.075.000			
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya surat kabar dan buku Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	Terpenuhinya data dan informasi melalui media massa dan buku peraturan perundang-undangan	100%	36.462.500			
11.	Penyediaan bahan logistik kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya bahan- bahan properti pameran	1 Kegiatan	Meningkatnya kualitas dan keindahan stand Bappeda dalam mendukung pelaksanaan pameran pembangunan	100%	25.000.000			
12.	Penyediaan makanan dan minuman			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya makan minum rapat dan tamu	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dan terlaksananya rapat-rapat	100%	75.000.000			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Meningkatnya koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan	100%	270.621.000			
14.	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	5 Tim/Panitia	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	34.090.000			
15.	Jasa pihak ke tiga			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya jasa pengumuman lelang	2 kegiatan	Memperlancar proses pelelangan	100%	3.000.000			
16.	Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya upah dekorasi dan pembuatan stand	1 paket	Meningkatnya kualitas dan keindahan stand bappeda dalam mendukung pelaksanaan pameran	100%	7.500.000			
17.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 tahun	Meningkatnya koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan	100%	80.000.000			
18.	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya petugas keamanan gedung kantor	3 orang	Terjaga dan terpeliharanya keamanan lingkungan gedung kantor	1 tahun	43.680.000			
<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>														
1.	Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Aula Bappeda)			M.Teweh, Kab. Barut			Aula Gedung Kantor Bappeda	1 unit	Terlaksananya pembangunan Aula gedung kantor Bappeda	100%	1.000.000.000			
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor	1 paket	Terpenuhinya sarana dan peralatan gedung kantor untuk menunjang kinerja aparatur	100%	38.750.000			
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Terlaksananya kegiatan pengecatan halaman kantor Bappeda	1 paket	Terciptanya halaman kantor yang baik dan indah	100%	22.500.000			



Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan			M.Teweh, Kab. Barut			Terpeliharanya Mobil jabatan	2 unit	Meningkatnya kelancaran operasional Kepala Bappeda	100%	91.367.250			
5.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			M.Teweh, Kab. Barut			Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 unit	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	100%	21.984.000			
6.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	100%	13.700.000			
7.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			M.Teweh, Kab. Barut			Terlaksananya pembuatan pagar depan dan samping kantor Bappeda	1 paket	Terciptanya kondisi gedung kantor yang aman dan representatif	100%	28.125.000			
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>													
1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						Tersedianya Aparatur dan SDM yang berkualitas	85%	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	100%	200.000.000			
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>													
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 ekspl	Terukurinya keberhasilan (capaian kinerja) program dan kegiatan lingkup Bappeda	100%	5.000.000			
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	10 ekspl	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	2.500.000			
3.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	10 ekspl	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	2.500.000			
4.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 ekspl	Tersusunnya data realisasi keuangan untuk 1 tahun anggaran	100%	2.500.000			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.	Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya RKA/DPA Bappeda Murni Tahun 2013 dan RKA/DPA Bappeda Perubahan Tahun 2012	40 buku	Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Kinerja Keuangan	100%	5.000.000			
<b>VI. Program Kerjasama Pembangunan</b>														
1.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah			M.Teweh, Kab. Barut			Terlaksananya koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	5 Kab.	Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah yang selaras	5 Kab.	43.758.400			
<b>VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>														
1	Penyusunan Rancangan RKPD		Tersedianya Dokumen Perencanaan	M.Teweh, Kab. Barut			Dokumen RKPD Kab. Barito Utara Tahun 2013	100 Buku	Terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	100%	118.265.000			
2	Pelaksanaan Musrenbang RKPD			M.Teweh, Kab. Barut			Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD	100%	Terakomodirnya dan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang akuntabilitas dan transparan	100%	400.000.000			
3	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			M.Teweh, Kab. Barut			1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring	100 Buku	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan	100%	290.600.000			
							2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan	100 Buku	dan kegiatan pembangunan daerah					
4	Penyusunan KUA, PPAS			M.Teweh, Kab. Barut			1. Tersusunnya KUA Perubahan Tahun 2013	100 Buku	Sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan dengan pagu anggaran	100%	200.000.000			
							2. Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun	100 Buku						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2013							
							3. Tersusunnya KUA Murni Tahun 2014	100 Buku						
							4. Tersusunnya PPAS Murni Tahun 2014	100 Buku						
<b>VIII.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>													
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		Terciptanya sinkronisasi program Pembangunan ekonomi	M.Teweh, Kab. Barut			Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	Terciptanya sinkronisasi program bidang ekonomi	100%	150.000.000			
<b>IX.</b>	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>													
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya			M.Teweh, Kab. Barut			Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%	Terciptanya sinkronisasi program bidang sosial budaya	100%	200.000.000			
4.	Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)			M.Teweh, Kab. Barut			Menunjang Terlaksananya Program PNPM	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	100%	50.000.000			
<b>X.</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam</b>													
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan		Terciptanya	M.Teweh,			Terlaksananya	100%	Tercapainya	100%	175.000.000			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bidang Prasarana Wilayah		sinkronisasi program Pembangunan prasarana wilayah	Kab. Barut			koord. perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah		sinkronisasi perenc. pembangunan bidang prasarana wilayah					
<b>XI.</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>													
1.	Penyusunan Buku IPM Kab. Barito Utara		Tersusunnya dokumen perencanaan dan statistik pembangunan	M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Buku Profil Daerah dan Data Desa Tertinggal	200 buku	Tersedianya Buku Profil Daerah	1	75.000.000			
2.	Penyusunan PDRB Barito Utara - Penyusunan Buku PDRB Barito Utara - Rapat Regional PDRB Sekalteng di Muara Teweh			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara	60 buku	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Barito Utara	100%	376.333.000			
3.	Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2012	75 buku	Tersedianya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	100%	69.692.000			
							Tersusunnya Buku Laporan Triwulan Tahun 2012	100 buku	Tersedianya Buku Laporan Triwulan Tahun 2012	100%				
9.	Penyusunan Barito Utara dalam Angka			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Buku Barito Utara dalam Angka	60 buku	Tersedianya Buku Barito Utara dalam Angka	100%	125.000.000			
10	Penyusunan Tabel data input output			M.Teweh, Kab. Barut			tersedia data input output	30 buku			50.000.000			
<b>XII.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>													
1	Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPPMD)		Meningkatnya arus investasi di Kabupaten Barito Utara	M.Teweh, Kab. Barut			Terlaksananya RKPPMD	1 kali	Terbentuknya kesepakatan pemerintah, swasta dan masyarakat	100%	75.507.000			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										dalam hal perenc. penanaman modal daerah				
2	Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan			M.Teweh, Kab. Barut			Terwujudnya keikutsertaan pada konsolidasi perenc. penanaman modal	100%		Meningkatnya kesepahaman antar daerah dalam peningkatan investasi	80%	21.153.600		
3	Promosi potensi daerah dan peluang investasi			M.Teweh, Kab. Barut			Mengikuti Promosi Investasi Daerah	6 orang		Dikenalnya Kab. Barito Utara sebagai alternatif tujuan investasi	60%	100.000.000		
4	Pembuatan booklet potensi dan peluang investasi			M.Teweh, Kab. Barut			Tersedianya leaflet mengenai potensi dan peluang investasi	2000 expl		Meningkatnya jumlah referensi media promosi	80%	75.000.000		
5	Data profil investasi sektor unggulan			M.Teweh, Kab. Barut			Tersusunnya Buku Profil Investor Sektor Unggulan	200 Buku		Meningkatnya jumlah referensi media promosi	80%	53.551.000		
<b>XIII.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>													
1	Pengawasan dan pengendalian investasi		Meningkatnya arus investasi di Kab. Barut	M.Teweh, Kab. Barut			Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian investasi	80 %		Perusahaan penanaman modal dpt menyampaikan LKPM	80 %	75.000.000		
2	Pembinaan PMA / PMDN			M.Teweh, Kab. Barut			Pelaksanaan Pembinaan PMA/PMDN	1 kali		Perusahaan penanaman modal dpt menyampaikan LKPM	80 %	45.453.000		
3	Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN			M.Teweh, Kab. Barut			Pelaksanaan Monitoring	1 kali		Perbaikan sistem dan prosedur investasi	75%	28.960.275		
<b>TOTAL</b>											<b>5.325.899.025</b>			